

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Australia mengimplementasikan *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* sebagai bagian dari kebijakan bantuan pembangunan luar negerinya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih menjadi permasalahan struktural di Papua Nugini. Penelitian ini didasari oleh tingginya tingkat ketidaksetaraan gender di Papua Nugini yang tercermin dalam rendahnya partisipasi perempuan pada sektor ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Melalui berbagai program yang dijalankan dalam kerangka *Australia NGO Cooperation Program (ANCP)* dan *Australia–Papua New Guinea Development Partnership Plan*, Australia menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di Papua Nugini. Implementasi strategi ini berfokus pada aspek utama kesetaraan gender dan bantuan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Australia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong kesetaraan gender di Papua Nugini melalui implementasi *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy*. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program bantuan yang secara langsung berkontribusi pada empat aspek utama kesetaraan gender yaitu *economic participation and opportunity, political empowerment, education attainment*, serta *health and well-being*. Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan

pembangunan Australia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen diplomatik namun juga sebagai sarana untuk menangani isu struktural yang selama ini membatasi akses perempuan terhadap sumber daya kesempatan dan partisipasi secara utuh dalam masyarakat. Seperti dalam aspek *economic participation and opportunity*, dimana program-program yang dilaksanakan Australia berhasil memperluas akses perempuan terhadap literasi keuangan modal usaha pelatihan kewirausahaan serta Posisi kepemimpinan di sektor bisnis dan korporasi berbagai program seperti *Pacific Women*, PSDI, MDF, dan *Microfinance Expansion Project* yang berkontribusi dalam memenuhi indikator-indikator ekonomi yaitu tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam perekonomian termasuk usaha dan lapangan pekerjaan, kesetaraan upah dengan beban kerja yang sama, representasi yang setara dalam posisi staff profesional/manajerial. Meskipun begitu masih terdapat beberapa tantangan dalam mencapai indikator lainnya seperti kesetaraan jatah cuti dan representasi perempuan dalam bekerja terampil.

Dalam aspek *political empowerment*, Australia berhasil mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan penguatan organisasi perempuan serta pendidikan politik program seperti YWLP, PNG Women Lead, dan *Strengthening PNG Parliament* memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam tingkat komunitas maupun tingkat nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peningkatan representasi politik perempuan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penentuan dalam jabatan politik namun juga penguatan kapasitas, kepercayaan diri dan dukungan sosial terhadap kaum perempuan.

Program-program tersebut juga berhasil memenuhi indikator-indikator utama dari *political empowerment* yaitu representasi perempuan sebagai pemimpin di parlemen, perempuan sebagai pemimpin dalam komunitas lokal/regional dan kesempatan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam posisi pengambil keputusan. Dalam aspek *education attainment*, Australia berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa, peningkatan kapasitas guru, penguatan manajemen sekolah serta pengembangan lingkungan belajar yang lebih inklusif.

Program-program pendidikan seperti PIE, PASS, *Australian Awards*, dan *Adult Literacy and Numeracy* berhasil memenuhi indikator-indikator utama dari aspek education agreement yaitu peningkatan angka literasi, kesetaraan gender di tingkat pendidikan primer, sekunder dan tersier (pendidikan tinggi) dan program beasiswa. Sementara itu, dalam aspek *health and well-being*, Australia berusaha memperkuat sistem layanan kesehatan primer dan kesehatan reproduksi melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan secara general serta penanganan HIV/AIDS dan IMS yang lebih komprehensif. Upaya tersebut tercermin dari program-program seperti SHRH C-Surge, SRHIP, *Keeping Girls in School Through Improved Reproductive and Menstrual Health* dan *The Rural Primary Health Services Delivery Project* yang berhasil memenuhi indikator aspek *health and well-being* yaitu kesehatan reproduktif, tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki, serta akses terhadap fasilitas kesehatan umum dan kesehatan reproduktif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* telah menjadikan bantuan

pembangunan Australia sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Papua Nugini. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya yang menyentuh seluruh dimensi utama kesetaraan gender sebagaimana dijelaskan dalam konsep *gender equality*.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penulis, terdapat saran bagi penelitian selanjutnya dengan topik penelitian *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* sebagai bentuk kebijakan luar negeri Australia. Penulis dapat melakukan analisa terhadap lebih banyak program serta mengidentifikasikannya ke dalam konsep *gender equality* melalui indikator *Economic Participation and Opportunity*, *Political Empowerment*, *Educational Attainment Health and Well-being*. Namun terdapat beberapa kekurangan seperti banyaknya program yang tidak bisa diakses terutama yang termasuk dalam rumpun kekerasan sehingga analisa belum termasuk menyeluruh dan optimal. Untuk program berbasis kebijakan kesetaraan gender, penulis berpendapat bahwa masih sedikit penyesuaian dengan konsep *gender equality* serta minimnya program berjangka panjang sehingga masih membutuhkan pelatihan serta *monitoring* dengan membuat *Key Performance Indicator* (KPI) yang diharapkan dapat membantu Papua Nugini dalam meningkatkan kesetaraan gendernya.